

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globaisasi ini *Good Governance* atau pemerintahan yang baik sangat diperlukan karena pada hakikatnya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melayani masyarakatnya. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau juga disebut *Good Governance* adalah pertanggungjawaban, transparansi, keterbukaan, dan kerangka hukum dalam melayani masyarakatnya (*rule of law*).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Reformasi sektor publik harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dan reformasi kebijakan publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat negara di daerah baik struktur maupun infrastruktur. Lembaga-lembaga di daerah sepatutnya tidak lagi dijadikan sebagai alat pemerintah pusat semata, namun lebih difokuskan pada pelaksanaan lembaga secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, memiliki akuntabilitas dan memiliki kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan reformasi kelembagaan, dan infrastruktur, salah satunya kelembagaan adalah reformasi keuangan negara maupun daerah. Terbitnya

paket UU keuangan negara, disusul dengan Pemendagri 13 tahun 2006 mewujudkan secara *de-jure* mekanisme pengelola keuangan negara. Salah satu pengelolaan keuangan negara yang mendapatkan setoran adalah akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tiga hal, yaitu; Pertama, adalah untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawabnya. Kedua adalah untuk terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Ketiga adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dimana jenis dan isi diatur oleh PP 71/2010 tentang SAP.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah harus ada pengawasan dan pengendalian yang bertujuan agar berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan secara komprehensif dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini WTP berarti opini tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengembalian keputusan oleh para pemaku kepentingan (stakeholders). Selain itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang.

Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik.

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*).

Bayaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai peraturan dan juga masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyelenggaraan audit laporan keuangan pemerintah sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintahan harus bermanfaat dan sesuai dengan karakteristik kualitatif sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah No 71/2010 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan syarat normatif. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah tidak memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2019 semester I bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki maka akan mempengaruhi efektivitas suatu program, seperti permasalahan pada sistem pengendalian intern, penyimpangan Administrasi, ketidakpatuhan terhadap

ketentuan perundang-undangan ketidakhematan, ketidak efisienan dan juga ketidakefektifan dalam pelaporan keuangan (www.bpk.go.id).

Permasalahan yang sudah d paparkan sebelumnya adalah merupakan permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintahan, tidak terkecuali pada Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan pun mengatakan bahwa Kementerian Agama masih terdapat permasalahan-permasalahan yang bisa mempengaruhi informasi laporan keuangan, berikut tabel hasil temuan permasalahan oleh BPK semester I tahun 2019 pada Kementerian Agama:

Tabel 1.1

Temuan Kelemahan Dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama

Keterangan	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp)
A. Kelemahan SPI	16	-
• Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan	6	-
• Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	6	-
• Kelemahan Struktur Pengendalian Internal	4	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan	26	34,706,16
• Kerugian	10	18,953,95

• Potensi kerugian	3	101,80
• Kekurangan penerimaan	4	15,650,41
• Penyimpangan Administrasi	9	-

(sumber: www.bpk.go.id) (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan kementerian agama. Dapat dilihat bahwa masih ada kelemahan-kelemahan yang dimana kelemahan ini bisa menyebabkan kerugian sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Masih terdapat permasalahan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern dengan total 16 permasalahan, diantaranya yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan, Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja, dan Kelemahan Struktur Pengendalian Internal, masih terdapat permasalahan Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan peundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan Administrasi sebanyak 26 permasalahan.

Hal-hal yang menjadi acuan dari BPK terhadap Kementerian Agama tersebut juga menjadi sebuah teguran yang keras, maka hal tersebut seluruh petugas yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan laporan keuangan dituntut untuk melakukan perbaikan secara berjenjang dengan harapan hal ini akan merubah penyajian laporan keuangan sehingga memenuhi standar karakteristik kualitatif yang sesuai dengan PP NO. 71/2010.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dari permasalahan di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
2. Masih adanya kelemahan sistem pengendalian dalam menyusun laporan keuangan sehingga menyebabkan kerugian dalam pelaporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat didentikasi penulis yaitu **“Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan yaitu **“Untuk mengetahui besaran sistem pengendalian internal manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.**

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis megarapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu yang berguna sebagai bahan rujukan, referensi, dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian khususnya dalam kualitas laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan serta mengembangkan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya mengenai kualitas laporan keuangan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa barat.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan kemampuan analisis yang lebih luas mengenai Kualitas laporan keuangan

c. Bagi Peneliti lainnya dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan mengenai kualitas laporan keuangan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Geodhart dalam Alfin Sulaiman (2011:20) memberikan penjelasan mengenai keuangan negara yakni keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut. Untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya landasan teori. Teori dapat menjadi acuan dalam menyusun kerangka pemikiran dan rancangan teori.

Menurut Mahmudi (2016: 20) pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 yang dikutip yang dikutip oleh Mahmudi (2016: 20) pengendalian internal memiliki 5 komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah.

Abdul Halim (2008:35) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang diperlukan. Laporan Keuangan Pemerintahan adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode di dalam pemerintahan. Laporan keuangan digunakan untuk melaksanakan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa yang memegang keuangan di dalam suatu organisasi bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya. Karakteristik kualitatif yang terkait dengan laporan keuangan pemerintahan merupakan suatu ciri khas laporan keuangan pemerintahan yang dihasilkan dalam proses akuntansi dan berguna bagi

pemakai informasi. Jika diimplementasikan pada lapran keuangan pemerintah adalah informasi keuangan pemerintahan yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur laporan keuangan pemerintahan.

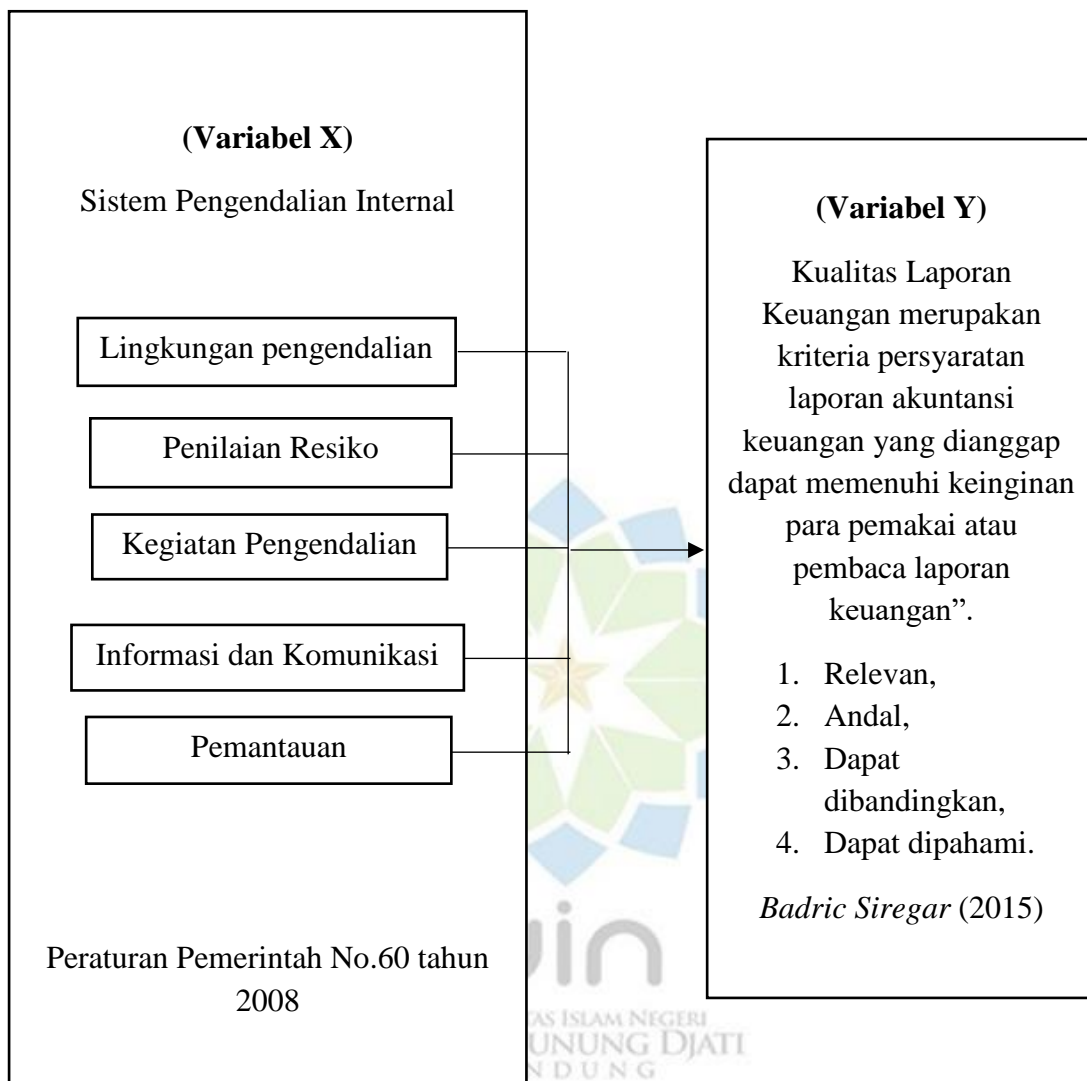
Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Karakteristik Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dalam buku Baldric Siregar (2017) antara lain:

1. Relevan, yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu dan lengkap
2. Andal, yaitu yang disajikan jujur, dapat diverifikasi, dan netral.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh semua pihak dan pengguna.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran



1.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesisi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

Ha Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Ho Sistem Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

